

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara berkembang menghadapi beberapa tantangan dalam perjalanan mereka menuju modernisasi. Pendapatan nasional di negara terbelakang seringkali rendah, dan pembangunan ekonomi biasanya bertahap. Banyak negara berkembang lainnya punya masalah serius dengan ketimpangan ekonomi ataupun ketimpangan distribusi pendapatan diantara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah, serta dengan prevalensi kemiskinan secara umum. (Kurmalasari M, 2011).

Seperti halnya pemerintah di tempat lain, pemerintah Indonesia sangat menekankan pada pemberantasan kemiskinan. Tingginya konsentrasi kemiskinan menyebabkan kesulitan menutupi biaya hidup yang paling dasar sekalipun, kita katakan bahwasanya mereka miskin sebab standar hidup yang masih terlalu rendah, upah minimum yang tidak mencukupi, dan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat, faktor ini semua bisa berkontribusi pada masalah kemiskinan. Meskipun mengatasi kemiskinan secara keseluruhan termasuk prioritas pembangunan nasional, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Oleh sebab itu, upaya pengentasan kemiskinan harus bersifat menyeluruh, menjawab kebutuhan masyarakat di segala bidang kehidupan, dan dilakukan secara terpadu (Nasir dkk,2008).

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, saat kebutuhan dasar individu ataupun kelompok orang untuk hidup dan berkembang secara bermartabat tidak terpenuhi, mereka dikatakan hidup dalam kemiskinan. Ketidakmampuan guna mengenyam pendidikan termasuk satu dari faktor penyebab rendahnya produktivitas masyarakat miskin.

Tujuan dari upaya pembangunan ekonomi setiap bangsa harus meningkatkan kekayaan nasional dengan memperbaiki berbagai penyakit sosial dan ekonomi negara. bila saat ini pembangunan dijadikan tolak ukur oleh semua warga negara serta terlepas dari faktor atribusinya (Pemberian wewenang pemerintahan), bisa disimpulkan bahwasanya kemajuan yang merata di masyarakat menjadi satu dari tujuan utama

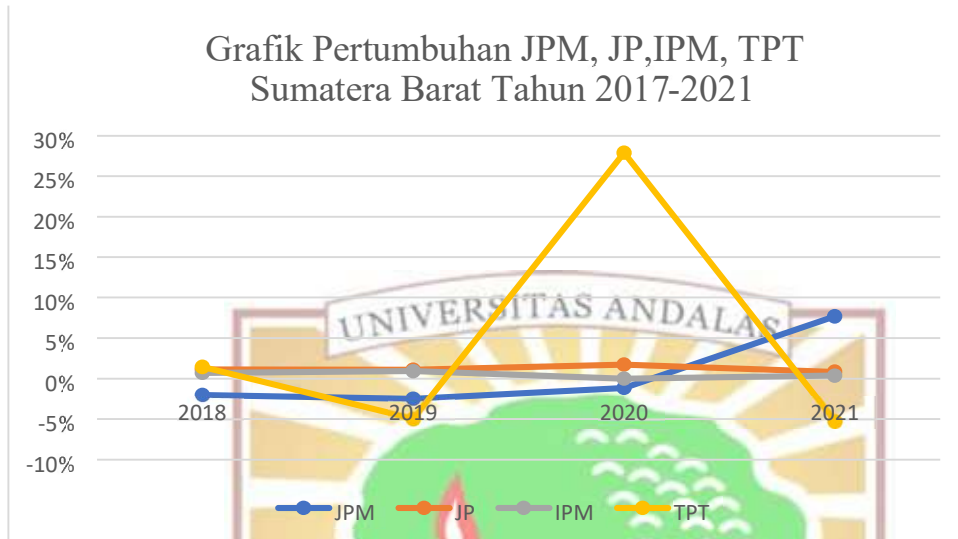
pembangunan bagi pemerintah Indonesia. Akan tetapi satu dari kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia yakni ketimpangan pembangunan daerah. Selama ini hanya terfokus di daerah perkotaan dan mengenyampingkan masyarakat pedesaan. Ketimpangan dan kurang meratanya pembangunan inilah yang menjadi pemicu terjadinya kemiskinan (Marwoto, 2016).

Kemiskinan telah menjadi masalah utama di Indonesia sejak lama, dan ini sebab pemerintah tidak pernah menerapkan metode dan kebijakan yang tepat—khususnya program pemberdayaan masyarakat miskin dimana berpihak pada lapisan masyarakat paling bawah. Inisiatif-inisiatif pembangunan dan program-program lain yang ditujukan guna mengentaskan kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (Ramadhan, 2014).

Provinsi Sumatera Barat berkomitmen terhadap inisiatif nasional dan daerah guna memerangi kemiskinan, yang termasuk satu dari prioritas tertinggi provinsi. Hasil dari kebijakan dan inisiatif ini di bawah standar. sebab kebijakan dan inisiatif pengentasan kemiskinan cenderung berfokus pada sektor-sektor tertentu, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sebelum strategi itu bisa dianggap berhasil. Bila kita ingin mengakhiri kemiskinan untuk selamanya, kita memerlukan pendekatan multifaset yang memanfaatkan sumber daya yang ada dan menciptakan putaran umpan balik yang positif. Banyaknya masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Barat termasuk persoalan yang berulang. Setiap anggota masyarakat punya peran dalam mengentaskan kemiskinan. Namun pemerintah dalam peranannya sebagai penyangga dalam proses peningkatan kehidupan masyarakat harus bertindak cepat guna mengurangi tingkat kemiskinan (Dores, E. 2014).

Grafik 1.1

Grafik Pertumbuhan JPM, JP, IPM, TPT di Sumatera Barat



Pada grafik 1.1 terlihat bahwasanya pertumbuhan jumlah penduduk miskin dari tahun 2017-2021 di Sumatera Barat meningkat. Dimana di Tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berjumlah 364.510 jiwa dan di Tahun 2021 sudah berjumlah 370,670 jiwa, maksudnya selama tahun 2017-2021 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan dengan peningkatan senilai 0,5% pertahun.

Jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2017-2021 pada grafik 1.1 mengalami pertumbuhan dengan peningkatan yang berfluktuatif. Di tahun 2017 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 5,321 juta jiwa dan di Tahun 2021 berjumlah 5,580 juta jiwa. Selama tahun 2017-2021 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan dengan rata-rata peningkatan senilai 1,19% pertahun.

Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat di Tahun 2017-2021 berupa yang terlihat pada grafik diatas mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan. Dimana di Tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat senilai 71,24% dan di Tahun 2021 senilai 72,65%. Selama tahun 2017-2021 Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat mengalami pertumbuhan dengan rata-rata peningkatan senilai 0,49% pertahun. Dalam penelitian ini peneliti melihat komponen-komponen IPM sebagai variable penelitian yang meliputi Angka harapan hidup, Rata – rata lama sekolah,

Harapan lama sekolah dan yang terakhir Pengeluaran perkapita di provinsi Sumatera Barat.

Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat yang terlihat pada grafik 1.1 mengalami peningkatan yang berfluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan senilai 4,9% dan di tahun 2020 meningkat senilai 27,9%, setelah itu menurun kembali di tahun 2021 senilai 5,2%. Meskipun tingkat pengangguran terbuka di Sumatera barat meningkat yang berfluktuatif, tapi rata-rata tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan senilai 4,78% pertahun. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2017) juga menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Indonesia tahun 2011-2015.

Jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka yang telah kita lihat pada bagian sebelumnya semuanya bisa berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, penulis menulis skripsi dengan judul : "**Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat**"

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang muncul :

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk, komponen IPM dan tingkat pengangguran terbuka secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah penduduk, komponen IPM dan tingkat pengangguran terbuka secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, IPM, dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk , IPM, dan tingkat pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai saran dan implementasi ilmu pengetahuan bagi perkembangan dunia pendidikan dan perekonomian serta memberikan pembuktian yang empiris hubungan antara variabel-variabel terhadap jumlah penduduk, ipm dan tingkat pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan.

2. Secara Metodologi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peneliti selanjutnya, dan dipercaya bahwa penelitian berikutnya dapat memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dari penelitian ini.

3. Manfaat Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi pemerintahan yang terkait seperti kementerian sosial, kementerian koordinator kesejahteraan rakyat, dan khususnya dinas sosial provinsi Sumatera Barat dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan.